

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang dihadapi suatu negara bisa jadi tidak berdampak pada skala internasional, tetapi juga bisa menjadi ancaman terhadap ketentraman dan perdamaian global. Isu-isu ini muncul di dalam suatu negara akibat dari kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai, bahkan bisa juga berkaitan dengan kepentingan pribadi. Seringkali, dalam upaya untuk mencapai kepentingan dan tujuan negara, timbul pertikaian atau bentrokan. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik politik internal, krisis politik, masalah ekonomi, serta isu agama dan sosial budaya. Tidak jarang, kehadiran konflik ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di negara tersebut. bisa jadi tidak berdampak pada skala internasional, tetapi juga bisa menjadi ancaman terhadap ketentraman dan perdamaian global. Isu-isu ini muncul di dalam suatu negara akibat dari kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai, bahkan bisa juga berkaitan dengan kepentingan pribadi. Seringkali, dalam upaya untuk mencapai kepentingan dan tujuan negara, timbul pertikaian atau bentrokan. Konflik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik politik internal, krisis politik, masalah ekonomi, serta isu agama dan sosial budaya. Tidak jarang, kehadiran konflik ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di negara tersebut. adapun ancaman konflik seperti kasus intervensi militer ini berdampak pada tindakan kudeta (Rahmi, 2022).

Sebuah negara yang menghadapi kudeta militer dapat dikatakan memiliki ciri khas pengalaman dan perjalanan bernegara yang berbeda dibandingkan dengan insiden politik lainnya, sehingga sulit bagi negara tersebut untuk mencapai posisinya saat ini. Kudeta adalah salah satu bentuk intervensi militer terkait isu politik. Dalam konteks pelaksanaan demokrasi, kudeta menjadi indikasi mundurnya kemajuan demokrasi di suatu negara.

Begitu juga dengan Myanmar, proses bernegara yang dialami oleh Myanmar tentu mengalami pasang surut dalam terjadinya perubahan dan perkembangan di dalam negaranya. Selain adanya perkembangan dan perubahan demi perubahan, juga ditandai dengan gejolak, baik dari segi ekonomi, masyarakat, sosial budaya dan khususnya dalam proses politik. Myanmar, paling tidak sering mengalami kudeta sejak negara tersebut.

Pada 1 Februari 2021 lalu dunia dikejutkan dengan kudeta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing terhadap pemerintahan sipil. Harapan terhadap tumbuh dan berkembangkan demokrasi seiring dengan transisi menuju demokrasi yang bergulir sejak 2010 berubah menjadi pesimis dengan kembalinya militer sebagai penguasa politik seperti yang terjadi ketika Jenderal Ne Win berkuasa di tahun 1962. Tuntutan itu dihadapi dengan tindakan represif aparat keamanan militer. Berdasarkan catatan *Assistance Association for Political Prisoners* (AAPP), suatu aliansi untuk pendampingan terhadap tahanan politik, dalam kurun waktu Februari hingga November 2022 lebih dari 2.436 orang tewas akibat kekerasan militer Myanmar serta 16.191 orang ditahan. Data ini kemungkinan terus bertambah mengingat tidak ada tanda-tanda junta militer akan

menghentikan tindakan represif terhadap kelompok pro demokrasi (Firnas & Rizky, 2023).

Myanmar memasuki era demokrasi yang lebih formal pada tahun 2011 setelah puluhan tahun pemerintahan militer. Pemilu 2015 merupakan momen kunci dalam transisi Myanmar, di mana partai Aung San Suu Kyi, *National League for Democracy* (NLD), memenangkan mayoritas suara dan membentuk pemerintahan sipil. Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin *de facto* negara tersebut meskipun konstitusi Myanmar melarangnya menjabat sebagai presiden karena memiliki anak kewarganegaraan asing (BBC News, 2021).

Sebelum kudeta militer 1 Februari 2021, sejumlah tantangan dan hambatan terhadap proses demokrasi di Myanmar telah diidentifikasi oleh berbagai sumber, beberapa faktor yang terjadi seperti ketergantungan antara ekonomi dan politik berdampak pada perkembangan suatu negara. Negara-negara Dunia Ketiga mengalami ketergantungan secara ekonomi terhadap negara-negara maju. Untuk melakukan transisi demokrasi dapat dilakukan seiring dengan berjalannya integrasi ekonomi. Akan tetapi, kebanyakan negara berkembang mengalami jebakan kejahatan atau *violence trap* yang mengakibatkan perekonomian Myanmar tidak stabil (Firnas & Rizky, 2023).

Pada proses tahapan kudeta yang di lakukan pada permasalahan tersebut bermula dari respon yang dilayangkan oleh pihak militer karena menganggap adanya kecurangan pada pemilihan umum yang terjadi di tahun 2020 melalui pimpinan kudeta, yakni Jenderal Min Aung Hlaing, sehingga kudeta yang dipimpin

oleh Min Aung Hlaing memicu terjadinya kecaman dari pihak internasional karena mencederai semangat demokrasi yang telah tercipta di Myanmar (Roza, 2021).

Perkembangan transisi demokrasi di Myanmar banyak menjadi sorotan karena Myanmar belum sepenuhnya menerapkan demokrasi sejak meraih kemerdekaan dari Kerajaan Inggris pada 4 Januari 1948 di bawah pimpinan Jenderal Aung San, di bawah Tentara Independen Burma. Dinamika politik Myanmar sebenarnya sudah terjadi sejak kemerdekaannya pada 4 Januari 1948, di mana Myanmar tidak pernah terlepas dari adanya gejolak politik dalam negeri yang mengakibatkan kudeta militer yang terus berlanjut (Satyadinata, 2014). Kudeta Myanmar mulanya terjadi pada 2 Maret 1962. Hal ini menandai dimulainya pemerintahan satu partai dan dominasi politik tentara di Myanmar yang berlangsung selama 26 tahun. Dalam kudeta militer menggantikan pemerintahan sipil *Anti Fascist Peoples Freedom League* (AFPFL), yang dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu, dengan Dewan Revolusi Persatuan, yang diketuai oleh Jenderal Ne Win (Nordginger, 1990). Kudeta Jendral Ne Win membentuk pemerintahan junta militer yang sangat otokratis di Myanmar. Sejak itu, Myanmar juga tumbuh menjadi negara yang cukup tertutup, terutama bagi pengunjung. Kudeta militer di Myanmar mempengaruhi stabilitas keamanan negara ketika menggulingkan pemerintahan sipil resmi yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Dengan adanya gejolak politik dalam negeri Myanmar, di mana arah serta tujuan dari adanya gejolak politik internal tersebut adalah demi terciptanya tatanan demokrasi. Demokratisasi dianggap sebagai dampak terhadap kualitas pemerintahan dan, pada gilirannya, prospek pembangunan. Berbagai penelitian

telah berusaha untuk mempersingkat persamaan ini dengan menguji hubungan antara demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, secara umum tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik, baik positif maupun negatif. Pertanyaan ini telah ditanyakan secara terbalik apakah tingkat pertumbuhan ekonomi berdampak pada demokratisasi yang menunjuk pada masalah penentuan (Przeworski, 2004). Arah kausalitas bahkan jika ditemukan hubungan. Disimpulkan dari hasil bahwa setidaknya demokrasi bukanlah halangan bagi pembangunan.

Demokrasi adalah metode politik, alat untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu pemimpin politik yang bersaing meraih suara (Lechman). Demokrasi adalah kemampuan untuk membedakan antara pemimpin politik pada saat konflik. Jika dilihat dari sisi demokrasinya, Myanmar merupakan negara demokratis yang ditandai dengan adanya pemilihan umum dan kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya sebelum terjadinya kudeta militer.

Dinamika demokrasi di suatu negara merupakan urusan dalam negeri, tetapi di era globalisasi ini, demokrasi adalah bagian dari isu internasional. Prinsip demokrasi di negara-negara Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi dan politik. Negara yang masih dikatakan sistem politiknya dikuasai oleh pemerintahnya atau otoriter yaitu Myanmar (Sinaga, 2013).

Eksistensi konflik kudeta militer memiliki implikasi yang sangat mendalam terhadap kehidupan masyarakat Myanmar pada masa sekarang. Salah satu implikasinya adalah terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Adanya

pelanggaran HAM di Myanmar seharusnya menjadi tanggung jawab negara tersebut, dan juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Masyarakat internasional memikul tanggung jawab atas nasib suku Rohingya, di mana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar secara tidak langsung merupakan genosida. Genosida adalah tindakan menghancurkan atau memusnahkan sekelompok orang karena latar belakang ras, agama, kebangsaan, atau etnis yang berbeda.

Selanjutnya, kudeta militer yang terjadi di Myanmar memberikan dampak terhadap kerusakan stabilitas keamanan di negara tersebut melalui langkah penggulingan pemerintah sipil resmi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Keberlanjutan konflik Myanmar tersebut mengakibatkan Myanmar mendapatkan sorotan dunia internasional. Di sepanjang sejarahnya, Myanmar telah terjadi selama beberapa tahun sebelumnya yang di mana juga mendukung terbentuknya berbagai gerakan demokrasi di negara tersebut, termasuk pada pelaksanaan kudeta terhadap pemerintahan yang terjadi pada tahun 1962. Hal ini menjadi satu di antara beberapa titik penting berkuasanya militer di Myanmar. Pada saat pasca kemerdekaannya, kondisi Myanmar dapat dikatakan masih sangat memprihatinkan apabila dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi hingga kudeta militer yang berlangsung hingga beberapa dekade termasuk kudeta yang terjadi pada tahun 1962 menjadi pemerintahan Myanmar sangat otoriter dan tertutup (Hlaing, 2012).

Sejak rezim militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil yang sah di bawah pemerintahan Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, Jenderal Min Aung Hlaing telah mengambil kuasa atas pemerintahan sipil yang telah berjalan

selama hampir 10 tahun. Dengan kudeta yang terjadi, runtuhan demokrasi di Myanmar yang telah dimulai secara *de facto* melalui pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Sejak kudeta militer, Aung San Suu Kyi dan beberapa anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dijadikan sebagai tahanan rumah. Tradisi kudeta tidak terlepas dari peran militer yang ikut campur terhadap pemerintahan sipil. Dari berbagai permasalahan yang terjadi, kecaman juga banyak datang dari berbagai organisasi internasional terutama Utusan Khusus PBB, yang mengecap dan mendorong agar militer Myanmar mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil (Masnawi & Siregar, 2023).

Eskalasi kekerasan di Myanmar semakin menghawatirkan dengan banyaknya korban yang berjatuhan, seperti terakhir pada rezim militer melakukan serangan bom di negara bagian Kachin, saat konser perayaan kelompok minoritas etnis Kachin dengan alasan menyerang kelompok separatis dan teroris di negara bagian Kachin. Dalam peristiwa itu, diperkirakan 80 jiwa terbunuh. Rezim militer Myanmar tidak hanya berhadapan dengan para demonstran (kalangan sipil), tetapi juga berhadapan dengan kekuatan para pemberontak yang menginginkan kemerdekaan dari Myanmar atau dari negara-negara bagian Myanmar, seperti kelompok bersenjata minoritas Karen, Kachin, Mon, dan Shan yang sejak tahun 2020 melakukan pemberontakan atau perlawanan terhadap rezim militer (Masnawi & Siregar, 2023).

Dari banyaknya respons yang muncul dan menentang kejadian ini, anggota ASEAN memberikan respons beragam terhadap kudeta militer di Myanmar. Beberapa negara, seperti Malaysia, menjadi negara anggota yang paling vokal

menyuarkan ketidakpatuhan junta militer Myanmar terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, Indonesia, sebagai Ketua ASEAN, telah melakukan lebih dari 180 pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan Myanmar, termasuk interlokutor dari negara tersebut. Namun, ada juga negara-negara anggota ASEAN yang menjaga jarak dan memilih menunggu situasi berkembang serta tidak memberikan respons yang tegas terhadap kudeta tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perpecahan dalam sikap ASEAN terkait kudeta di Myanmar.

Beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja, cenderung menjaga jarak dan tidak memberikan respons yang tegas terhadap kudeta militer di Myanmar. Sementara Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina menentang junta militer Myanmar dan mengkritik kekerasan yang terjadi di sana. Beberapa negara anggota ASEAN yang tidak mendukung kudeta militer di Myanmar antara lain seperti Indonesia, yang menyoroti peran ASEAN dalam ketegangan yang sedang terjadi di Myanmar saat ini dan menekankan pentingnya menjalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang tertera dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan konstitusional. Sementara Malaysia menjadi negara anggota yang paling vokal menyuarkan ketidakpatuhan junta militer Myanmar terhadap lima poin konsensus ASEAN.

Kekuatan penguasa militer, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, tetap sulit untuk ditandingi. Pertambahan jumlah personel militer setiap tahun memperkuat kekuasaan junta militer. Selain itu, peran penting individu dalam rezim militer membantu pemerintahan bertahan lebih lama karena keputusan yang

diambil demi kepentingan dominasi mereka. Kebijakan pemerintah junta militer yang sangat ketat dalam mengawasi masyarakat semakin memperkuat dominasi militer.

Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan isu yang mencederai demokrasi, yakni ketidakpatuhan junta militer di Myanmar, di mana isu ini penting untuk dikaji karena menyangkut stabilitas keamanan sebuah pemerintahan serta keterkaitannya terhadap hubungan bilateralnya dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain. Idealnya, sebagai negara yang sudah merdeka sejak deklarasi 4 Januari 1948, Myanmar dapat menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang terjadi secara demokratis dapat dilihat wujudnya melalui adanya pemilihan umum (pemilu) yang transparan dan demokratis. Namun, sejak tahun 1962 hingga 2021 terjadi adanya beberapa peristiwa kudeta militer terhadap pemerintah yang terpilih. Hal itu semakin menunjukkan bahwa masih ada bayangan otoriter dari sekelompok militer Myanmar yang berusaha untuk merusak tatanan demokrasi yang sedang dipupuk di Myanmar.

Pada permasalahan tersebut, penelitian mengenai tekanan dari negara ASEAN pasca kudeta militer memainkan peranan krusial dalam konteks kestabilan dan keamanan regional di Asia Tenggara. Setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih, Myanmar terjebak dalam krisis politik dan kemanusiaan yang mendalam, yang tidak hanya memicu ketegangan di dalam negeri, tetapi juga memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan melalui latar belakang masalah, maka penulis akan mengangkat sebuah pertanyaan penelitian, yaitu: “Bagaimana bentuk tekanan negara-negara ASEAN terhadap junta militer Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk tekanan dari negara-negara ASEAN terhadap junta militer Myanmar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji relevansi konstruktivisme dalam konteks tekanan yang diberikan oleh negara-negara ASEAN atas pelanggaran HAM dan demokrasi di Myanmar.
2. Membantu menganalisis fenomena junta militer Myanmar terhadap tekanan dari negara-negara ASEAN dalam lingkup internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menjadi rujukan untuk literatur di masa yang akan datang bagi penelitian selanjutnya yang serupa.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara praktis maupun secara teoritis, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menguraikan berisikan mengenai kajian teoritis serta kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, yang diharapkan dapat mengarahkan penelitian ini tepat pada apa yang akan dibahas. Selain itu, diharapkan dapat membantu penelitian ini dalam menjawab masalah pokok.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan metodologi penelitian yang disetujui oleh penulis. Metodologi penelitian meliputi paradigma penelitian yang penulis gunakan sebagai sudut pandang dalam mengkaji masalah, pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Semua sub-metodologi di atas dihubungkan bersama untuk mencapai cara terbaik untuk menjawab masalah penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memberi pembahasan yang telah dibantu oleh rincian bab-bab sebelumnya, di mana pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai aspek-aspek mana saja yang akan menjadi fokus penelitian. Dimulai dari tujuan utama pada permasalahan yaitu melihat dari segi tekanan yang diberikan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina terhadap junta militer Myanmar.

BAB V : PENUTUP

Bab ini ialah penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran. Bab ini akan menyimpulkan keseluruhan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.



